



# Rancangan Akhir PERUBAHAN RENJA

## KECAMATAN BUDURAN

## 2023



JL. H.R. MOCH. MANGOENDIPROJO NO. 270 TELP. 8921642

Telepon. 0318921642

Email : buduran@sidoarjab.go.id Website : sidoarjab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN BUDURAN**

JL. H.R. MOCH. MANGOENDIPROJO NO. 270 TELP. 8921642  
Telepon. 0318921642  
Email : buduran@sidoarjokab.go.id Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT BUDURAN  
NOMOR : 188/ 44 /438.7.3 / 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BUDURAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Buduran tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 'timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521J4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo -Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara' Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor I Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 050/5793/438.6.1/2023 tanggal 06 Juni 2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
  - b. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
  - c. Menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
  - d. Merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
  - e. Menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 26 Mei 2023

**CAMAT BUDURAN,**



**Drs. SYAMSURIJAL**

Penata Tk.I (IV/b)

NIP 196609121992031013



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BUDURAN

NOMOR : 188/ 44 /438.7.3 / 2023

TANGGAL : 26 Mei 2023

=====

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Camat Buduran  
Ketua : Sekretaris Camat  
Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan  
pada Kecamatan Buduran  
Anggota : a. Kepala Seksi Pemerintahan  
pada Kecamatan Buduran  
b. Kepala Seksi Pembangunan  
pada Kecamatan Buduran  
c. Kepala Seksi Perekonomian  
pada Kecamatan Buduran  
d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial  
pada Kecamatan Buduran  
e. Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban  
Umum pada Kecamatan Buduran  
f. Kasubag Umum dan Kepegawaian  
pada Kecamatan Buduran

**CAMAT BUDURAN,**



**Drs. SYAMSURIJAL**

Penata Tk.I (IV/b)

NIP 196609121992031013

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyelesaikan dan menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Buduran Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi setiap Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang akan digunakan dalam 1 (satu) periode anggaran.

Di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Buduran ini kami uraikan sesuai dengan Rencana Pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun anggaran 2023. Upaya koreksi konstruktif ataupun masukan-masukan sangat diperlukan oleh semua pihak untuk penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan khususnya masukan bagi langkah-langkah penyusunan tahapan selanjutnya.

Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023.

Sidoarjo, 31 Juli 2023

**CAMAT BUDURAN**



**Drs. SYAMSURIJAL**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196609121992031013



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1    Latar Belakang.....	6
1.2.    Landasan Hukum.....	13
1.3.    Maksud Dan Tujuan.....	17
1.4.    Sistematika Penulisan .....	18
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	37
BAB IV PENUTUP.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah .....	8
Gambar 1. 2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD .....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo .....	22
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran.....	29
Tabel 2. 3 Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Buduran.....	35
Tabel 3. 1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Buduran Tahun 2023 .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

##### **a. Pengertian Renja**

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagaimana amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, maka Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA–PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### **b. Proses Penyusunan Renja**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja PD diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

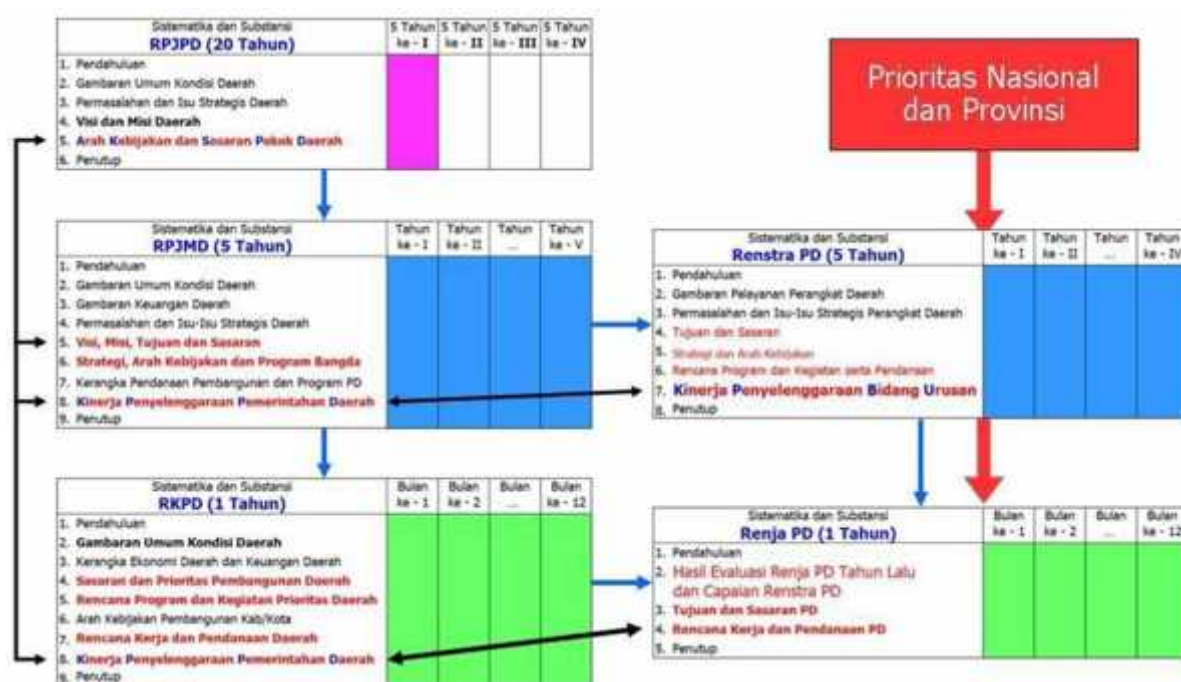
- 1) Persiapan penyusunan Renja PD ;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan ;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD ;
- 4) Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran ;

- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD ;
- 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

**c. Keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, Renja K/L Renja Provinsi/ Kabupaten/Kota, Proses Penyusunan RAPBD**

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1.

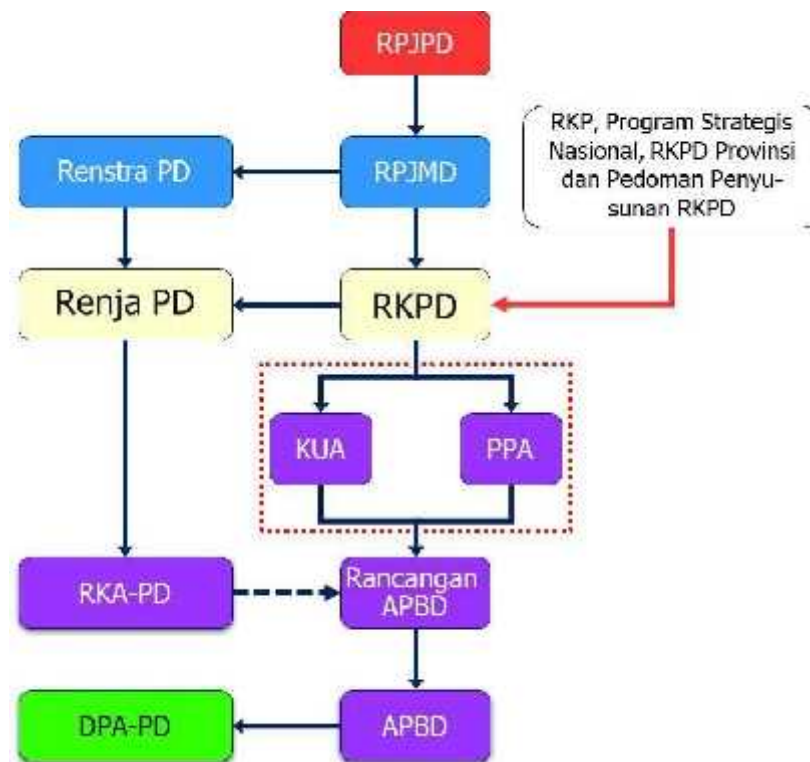
**Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**



Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.



**Gambar 1. 2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD**



Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKA-PD Tahun 2023.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran tahun 2023, merupakan Rancangan Perubahan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Buduran tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Buduran mengacu/sesuai dengan Visi Kabupaten Sidoarjo yaitu : **“Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 yakni Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha ;
2. **Misi Ke 2** : Membangkitkan pertumbuhan ekonomi fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan ;
3. **Misi Ke 3** : Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan ;
4. **Misi Ke 4** : Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar lainnya ;
5. **Misi Ke 5** : Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju, Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026. Selanjutnya 17 Agenda Pokok tersebut diturunkan dalam program prioritas Perangkat Daerah. Yaitu :

1. Program Prioritas 1 : 100.000 Lapangan Kerja Baru ;
2. Program Prioritas 2 : BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga ;
3. Program Prioritas 3 : Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin ;
4. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah ;
5. Program Prioritas 5 : Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama ;
6. Program Prioritas 6 : Rp. 5 Juta - 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan ;
7. Program Prioritas 7 : Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT ;
8. Program Prioritas 8 : 20.000 UMKM Naik Kelas ;
9. Program Prioritas 9 : Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan ;
10. Program Prioritas 10 : Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu ;
11. Program Prioritas 11 : Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer ;
12. Program Prioritas 12 : Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda ;
13. Program Prioritas 13 : 2.000 Warung Rakyat Direnovasi ;
14. Program Prioritas 14 : Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera ;
15. Program Prioritas 15 : 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat ;
16. Program Prioritas 16 : Reformasi Perijinan Untuk Bisnis yang Kondusif ;
17. Program Prioritas 17 : Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah.

Dengan demikian maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Buduran menunjang Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Buduran sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Buduran memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran Tahun 2023 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buduran.

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dijelaskan tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Buduran yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan tersebut Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo mempunyai peran yang amat strategis dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai aparatur terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan landasan hukum dan memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standard yang berlaku.

Dalam rangka Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Buduran Tahun 2023 tersebut, Penyusunan Rencana (Renja) Perubahan Kecamatan Buduran Tahun 2023 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang\_Undang nomor 23 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pearturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;



12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ;
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ;
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ;
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 75).
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran Tahun 2023 yaitu :

1. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja ;
2. Merupakan tolok ukur bagi Kecamatan Buduran dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Kecamatan Buduran setiap tahun berdasarkan capaian target yang telah ditetapkan ;
3. Merupakan acuan/pedoman arah bagi kecamatan Buduran dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan

dilaksanakan agar target indikator program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik ;

4. Merupakan gambaran terhadap kinerja Kecamatan Buduran yang efektif, berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Buduran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo ;
2. Sebagai dasar dan pedoman untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Buduran dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 ;
3. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kewilayahan dan laporan kinerja ;
4. Sebagai dasar atau acuan bagi Kecamatan Buduran dalam pengusulan dan penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TW 2 tahun 2023**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Buduran. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Buduran selama tahun 2023 tahun berjalan serta perkiraan target anggaran Tahun 2023. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Triwulan II Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Buduran dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 didasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Buduran antara lain :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;



2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 Kecamatan Buduran, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Buduran untuk tahun anggaran 2023 melaksanakan 5 program dan 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.522.782.684,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Buduran selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang tercantum pada Tabel 2.1 dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut tabel 2.1 Formulir E.81 mengenai Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.

**Tabel 2.1 Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo**

No.	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Buduran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	angka	89	Rp 38.038.095.618	95,51	Rp 2.621.188.639	88	Rp 5.353.860.652	90	Rp 807.673.437	91,21	Rp 1.705.471.303	0	Rp 0	0	Rp 0	91,21	Rp 2.513.144.740	100,00%	46,94%	91,21	Rp 5.134.333.379	100,00%	13,50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

No.	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangka t Daerah s/d						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II			III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Administrasi Barang Milik	Persentase BMD SKPD yang telah	%	85	Rp 0	100	Rp 0	85	Rp 300.000	20	Rp 0	25	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0.00%	0.00%	100	Rp 2.621.188.639	100.00	0.00%
				Persentase BMD SKPD yang telah	%	85		0		85		20		25		0		0		0		0.00%	%	0		0.00%	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	Rp 418.000	0	Rp 418.000	6	Rp 300.000	1	Rp 0	4	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0.00%	0.00%	0	Rp 2.621.188.639	0.00%	627,078.62%
			Administrasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	angka	90	Rp 0	0	Rp 181.268.060	88	Rp 367.336.913	98,64	Rp 81.927.860	96,22	Rp 94.240.200	0	Rp 0	0	Rp 0	194,9	Rp 176.168.060	100.00%	47,96%	194,9	Rp 2.797.356.699	100.00	0.00%
			Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi																							
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	Rp 3.280.200	0	Rp 3.280.200	2	Rp 3.658.400	1	Rp 1.812.200	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 1.812.200	50.00%	49,54%	1	Rp 2.623.000.839	50.00%	79,964,66%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	Rp 25.099.400	0	Rp 25.081.100	17	Rp 33.334.800	11	Rp 15.708.000	6	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	11	Rp 15.708.000	64.71%	47,12%	11	Rp 2.636.896.639	100.00	10,505,82%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	Rp 87.000.000	0	Rp 79.900.000	2	Rp 110.000.000	2	Rp 19.700.000	2	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 19.700.000	100.00%	17,91%	2	Rp 2.640.888.639	100.00	3,03550%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	Rp 8.215.120	0	Rp 8.205.000	3	Rp 5.255.200	2	Rp 1.952.400	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 1.952.400	66.67%	37,15%	2	Rp 2.623.141.039	100.00	31,930,65%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	Rp 2.260.000	0	Rp 1.955.000	24	Rp 2.400.000	3	Rp 240.000	3	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 240.000	12.50%	10,00%	3	Rp 2.621.428.639	12.50	115,992,42%
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	2	Rp 22.819.236	0	Rp 22.714.500	12	Rp 12.336.000	6	Rp 6.144.000	6	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	6	Rp 6.144.000	50.00%	49,81%	6	Rp 2.627.332.639	100.00	11,513,67%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	Rp 126.999.469	0	Rp 125.530.000	4	Rp 200.352.513	1	Rp 36.371.260	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 36.371.260	25.00%	18,15%	1	Rp 2.657.559.899	25.00	2,09258%
			Penyediaan Jasa	Persentase terpenuhinya jasa	%	95	Rp 0	100	Rp 629.885.874	85	Rp 1.574.888.712	25	Rp 259.654.268	25	Rp 370.231.606	0	Rp 0	0	Rp 0	50	Rp 629.885.874	58.82%	40,00%	150	Rp 3.251.074.513	100.00	0.00%

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d							
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II			III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Rp 1.739.878	0	Rp 1.427.960	4	Rp 1.391.112	1	Rp 385.200	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 385.200	25.00%	27.69%	1	Rp 2.621.573.839	25.00%	150,675.73%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	Rp 137.200.000	0	Rp 105.878.642	4	Rp 143.500.000	1	Rp 29.237.858	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 29.237.858	25.00%	20.37%	1	Rp 2.650.426.497	25.00%	1,931.80%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	Rp 1.308.337.600	0	Rp 1.008.430.932	4	Rp 1.429.997.600	1	Rp 230.031.210	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 230.031.210	25.00%	16.09%	1	Rp 2.851.219.849	25.00%	217.93%
				Pemeliharaan Barang	Persentase Barang Milik Daerah	%	85	Rp 0	0	Rp 46.238.117	80	Rp 105.000.000	80	Rp 19.500.000	80	Rp 26.738.117	0	Rp 0	0	Rp 0	160	Rp 46.238.117	100.00%	44.04%	160	Rp 2.667.426.756	100.00%	0.00%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan	4	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 65.000.000	1	Rp 9.000.000	4	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 9.000.000	25.00%	13.85%	1	Rp 2.630.188.639	25.00%	0.00%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9	Rp 64.700.000	0	Rp 64.699.250	4	Rp 40.000.000	1	Rp 10.500.000	2	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 10.500.000	25.00%	26.25%	1	Rp 2.631.688.639	11.11%	4,06752%
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																		44.68%										
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																		SR										
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Buduran			KECAMATAN																									
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	95	Rp 10.893.805.967	121	Rp 89.915.300	85	Rp 110.826.150	90	Rp 43.647.800	95	Rp 46.267.500	0	Rp 0	0	Rp 0	95	Rp 89.915.300	100.00%	81.13%	95	Rp 179.830.600	100.00%	1.65%	
				Persentase desa yang mendapat	%	95		137		85		0		100		0		0		100		100.00%		237		100.00%		
				Persentase izin yang menjadi	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0.00%		0		0.00%		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama	Laporan	4	Rp 0	15	Rp 1.104.800	4	Rp 2.512.500	2	Rp 1.104.800	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 1.104.800	50.00%	43.97%	17	Rp 91.020.100	100.00%	0.00%	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II			III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
												K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	Rp 2.512.500	0	Rp 1.104.800	1	Rp 2.512.500	1	Rp 1.104.800	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 1.104.800	100.00%	43.97%	1	Rp 91.020.100	25.00%	3,622.69%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	berkas	2400	Rp 0	2100	Rp 41.175.000	2100	Rp 50.000.000	964	Rp 0	1097	Rp 41.175.000	0	Rp 0	0	Rp 0	1097	Rp 41.175.000	52.24%	82.35%	3197	Rp 131.090.300	100.00%	0.00%
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	Rp 41.262.500	0	Rp 38.287.500	1	Rp 50.000.000	0	Rp 0	1	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0.00%	0.00%	0	Rp 89.915.300	0.00%	217.91%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan	Laporan	4	Rp 0	4	Rp 47.635.500	3	Rp 58.313.650	1	Rp 42.543.000	2	Rp 5.092.500	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 47.635.500	100.00%	81.69%	7	Rp 137.550.800	100.00%	0.00%
				Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	4		4		3		0		3		0		0		3		100.00%		7		100.00%	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	Rp 135.205.349	0	Rp 134.868.748	3	Rp 58.313.650	1	Rp 42.543.000	2	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 42.543.000	33.33%	72.96%	1	Rp 132.458.300	25.00%	97.97%
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																75.56%											
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																S											
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan			KECAMATAN																								
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangan	%	100	Rp 605.589.635	149	Rp 22.928.500	70	Rp 25.930.500	100	Rp 576.000	100	Rp 22.352.500	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 22.928.500	100.00%	88.42%	100	Rp 45.857.000	100.00%	7.57%
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	Laporan	8	Rp 0	1	Rp 21.792.500	8	Rp 24.040.500	2	Rp 0	3	Rp 21.792.500	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 21.792.500	37.50%	90.65%	4	Rp 44.721.000	50.00%	0.00%

No.	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 24.040.500	0	Rp 0	2	Rp 0	<div><div></div></div> 0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0.00%	0.00%	0	Rp 22.928.500	0.00%	0.00%
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	6	Rp 0	6	Rp 1.136.000	6	Rp 1.890.000	3	Rp 576.000	2	Rp 560.000	<div><div></div></div> 0	Rp 0	0	Rp 0	5	Rp 1.136.000	83.33%	60.11%	11	Rp 24.064.500	100.00%	0.00%
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	Rp 5.362.500	0	Rp 3.812.500	1	Rp 1.890.000	0	Rp 576.000	0	Rp 0	<div><div></div></div> 0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 576.000	0.00%	30.48%	0	Rp 23.504.500	0.00%	438.31%
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																		60.42%									
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																		R									
			KECAMATAN																								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	95	Rp 464.943.158	137	Rp 3.296.000	85	Rp 21.268.900	92	Rp 0	95	Rp 3.296.000	<div><div></div></div> 0	Rp 0	0	Rp 0	95	Rp 3.296.000	100.00%	15.50%	95	Rp 6.592.000	100.00%	1.42%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang	kegiatan	4	Rp 0	3	Rp 3.296.000	3	Rp 21.268.900	0	Rp 0	1	Rp 3.296.000	<div><div></div></div> 0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 3.296.000	33.33%	15.50%	4	Rp 6.592.000	100.00%	0.00%
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	365	Rp 17.462.540	0	Rp 0	361	Rp 17.433.900	0	Rp 0	0	Rp 0	<div><div></div></div> 0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0.00%	0.00%	0	Rp 3.296.000	0.00%	18.87%





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Buduran sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran.

**Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Buduran			82.8	88	88	89	89	90	91.12	98.32	89	89	
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan Ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik			100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	
3	Persentase Desa Maju Di Kecamatan Buduran			80%	NA	NA	NA	NA	NA	86,67%	NA	NA	NA	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			78.47(BB)	80(BB)	80.05(BB)	80.1(BB)	80.15(BB)	80.2(BB)	78.27(BB)	79.45(BB)	80.05(BB)	80.1(BB)	
5	Nilai RB			30.37	31.12	31.25	31.35	31,45	32	30.37	32.79	31.25	31.35	
6	Nilai IPP			3.19	3.51	3.55	3.57	3.60	3.80	3.19	3,39	3.55	3.57	
7	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi			70%	70%	75%	75%	80%	80%	100%	100%	70%	75%	

Dari tabel diatas, tergambar kinerja pelayanan Kecamatan Buduran Cukup Baik karena hampir semua indikator telah melampaui target kecuali nilai IPP dan nilai SAKIP. Pada tahun 2022 Nilai IPP Kecamatan Buduran sebesar 3,39 dengan kategori B dengan capaian 96,58% dari nilai 3,51 yang ditargetkan. Hal ini karena masih kurang memadainya sarana prasarana yang ada di kecamatan seperti toilet khusus pengguna disabilitas. Nilai IPP tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,2 poin atau 6,3% dibanding realisasi tahun 2021, kenaikan ini dipicu komitmen kecamatan untuk konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2022 Nilai SAKIP mengalami kenaikan yakni 79,45 (BB) jika dibandingkan dengan capaian 2021 yakni 78,27 (BB). Upaya yang dilakukan kecamatan untuk mencapai kriteria tersebut adalah memberikan pelayanan prima (excellent service) dan memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buduran**

### **1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Buduran**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Buduran berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Buduran dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersebut yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah. Adapun tugas Kecamatan yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Menyenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan ;
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Buduran memberdayakan SDM yang sudah memadai. Struktur Organisasi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan : Camat
- b. Unsur Pembantu Pimpinan ( Sekretaris camat ) terdiri dari :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana, Seksi-Seksi antara lain:
  1. Seksi Pemerintahan

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Seksi Perekonomian
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Pembangunan

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sumber daya manusia tersebut telah memadai untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, disamping itu pelayanan kinerja Kecamatan Buduran semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat secara riil.

Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Buduran cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi standart operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tuntutan masyarakat.

## **2. Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Buduran**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Buduran tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan dan Ketersediaan SDM Aparatur yang ada belum memadai
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Penerapan Teknologi Informasi serta SOP dan SP pelayanan administrasi terpadu kecamatan
3. Ketersediaan SDM Aparatur desa yang ada masih belum memadai dalam segi kuantitas dan kualitas
4. Masih kurang dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan

## **3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Buduran**

Berikut adalah analisa tantangan dan peluang baik Kantor Kecamatan Buduran dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

**i. Peluang**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang diberikan (Nilai SKM);
2. Penerapan dan Pemanfaatan teknologi informasi (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN), Aplikasi SIPRAJA, Web Aplikasi Plavon.sidoarjokab.go.id dan WA Hotline Pelayanan);
3. Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa serta perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
4. Meningkatnya tertib administrasi dan tepat waktunya pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penganggaran (penyusunan APBDes);
5. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang;
6. Adanya dukungan dari Bupati Sidoarjo terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan (pelimpahan kewenangan); Adanya peningkatan kualitas SDM Aparatur Kecamatan dan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana dan operasional pelayanan (Bimtek Kepegawaian)

Selain memiliki beberapa peluang, ternyata Kecamatan Buduran memiliki beberapa tantangan yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

**ii. Tantangan**

1. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan tupoksi;

2. Kurangnya akurasi data sebagai database perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Kecamatan;
3. Kurang tersedianya juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur (SOP dan SP) pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- b. Perbedaan persepsi antara bupati dan camat maupun desa dalam hal pelimpahan kewenangan;
- c. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam penunjang pelayanan yang diberikan;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan

#### **4. Isu-isu Strategis Kecamatan Buduran**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu Strategis dalam perencanaan strategis OPD Kecamatan Buduran merupakan kondisi actual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Buduran dalam lima tahun ke depan dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Buduran sebagai berikut :



**Tabel 2. 3 Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Buduran**

		KEKUATAN	KELEMAHAN
<b>ISU STRATEGIS</b>		Jumlah SDM Aparatur kecamatan yang memadai	Belum memadainya Kualitas SDM Aparatur Kecamatan
		Koordinasi bidang berjalan dengan baik	Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di kecamatan
		Berlakunya peraturan Bupati No 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.	Belum memadainya SDM Aparatur dan Sarana dan prasarana yang tersedia
			Belum optimalnya koordinasi antar bidang
			Belum optimalnya penggunaan electronic governance (e-government)
		Berlakunya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.	Belum optimalnya pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
		KEKUATAN	KELEMAHAN
<b>PELUANG</b>	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pemanfaatan	Mendorong efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan
	Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan berlakunya perpres tentang pelaksanaan e-government di instansi daerah dan pusat	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN)	melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana
	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan		
		KEKUATAN	KELEMAHAN
<b>TANTANGAN</b>	Belum terpenuhinya kompetensi SDM aparatur desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemerintahan desa melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan	Percepatan pemenuhan akuntabilitas organisasi melalui manajemen sistem informasi laporan kinerja dan keuangan
	Kompleksitas peran SDM aparatur desa dalam implementasi Undang-undang Desa		
	Tuntutan pemenuhan akuntabilitas organisasi pemerintah		

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasarkan pada analisis diatas, maka dapat dirincikan strategi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Kecamatan (SIPATEN) ;
2. Mendorong efektifitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana ;
3. Percepatan pemenuhan akuntabilitas organisasi melalui manajemen sistem informasi laporan kinerja (SAKIP) dan keuangan ;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemerintahan desa melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan alternatif strategi yang telah dibuat maka selanjutnya ditetapkan strategi yang akan digunakan oleh Kecamatan Buduran kedepannya. Penetapan strategi melalui diselenggarakannya Focus Grup Discussion (FGD) dimana hal yang menjadi pertimbangan penetapan strategi adalah isu strategis yang ada, sasaran yang diampu oleh kecamatan, kemampuan SDM dan urgenitas strategis tersebut berdasarkan pertimbangan hasil FGD maka strategi yang digunakan Kecamatan Buduran adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN); pemanfaatan Perkembangan teknologi dengan pelaksanaan e-government melalui WA Hotline Pelayanan Kecamatan Buduran dan web Aplikasi Plavon.sidoarjokab.go.id Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo serta Aplikasi SIPRAJA Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo;
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemerintahan Desa Melalui Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Adapun Sistematika penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017. Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pada Semester II, kedudukan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Buduran. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Buduran merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Buduran di tahun 2023 adalah sebanyak : 5 Program dan 13 Kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah mengalami perubahan sebesar Rp. 5,522,782,684.00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Program dan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Buduran Sidoarjo Tahun 2023 terdiri atas 5 Program, yaitu :

- I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 6 Penyediaan Bahan/Material
    - 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1 Penyediaan Jasa Surat/menyurat
    - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
    - 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## II Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - 1 Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - 1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  - 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- IV Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - 2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- V Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - 2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Rancangan Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3. 1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Buduran Tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Buduran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN										5,468,011,127	5,522,782,684			10,124,300,006			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,354,708,087	5,362,858,087			7,536,254,776			
7	1	1	02 .0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,005,500	2,005,500			3,504,747			
7	1	1	02 .0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	2 Dok umen	3 Dok umen	88 inde ks	88 inde ks	1,051,500	1,051,500	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariat	88 %	1,047,617
7	1	1	02 .0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	1 Lap oran	1 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	618	618	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariat	88 %	1,718,064
7	1	1	02 .0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasa n aparatur perangka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai Survey Kepuasa n Masvarak	Kab . Sid oarj o,	88 %	88 %	4 Lap oran	4 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	336	336	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka	88 %	739,07

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Daerah	at (SKM) Kecamat an	Bud ura n,										t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan				
7	1	1	02 .0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,304,329,527	3,304,329,527			5,501,395,326			
7	1	1	02 .0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	264 O rang/b ulan	263 O rang/b ulan	88 inde ks	88 inde ks	3,304,188,52 7	3,304,188,52 7	PAD  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	5,501,105,117
7	1	1	02 .0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	1 Lap oran	1 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	141	141	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	290,21
7	1	1	02 .0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										300	0			556,34			
7	1	1	02 .0 3	6	Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat	Kab . Sid oarj o, Bud ura	88 %	88 %	6 Lap oran	6 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	300	0	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap	88 %	556,34



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/  Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
						pelayana n kesekret arian		an	n,										pelayana n kesekret arian			
7	1	1	02 .0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0			15,000,000			
7	1	1	02 .0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret arian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	11 Pa ket	11 Pa ket	88 inde ks	88 inde ks	0	0	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret arian	88 %	5,000,000
7	1	1	02 .0 5	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret arian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	2 Ora ng	2 Ora ng	88 inde ks	88 inde ks	0	0	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret arian	88 %	10,000,000
7	1	1	02 .0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										368,145,237	339,094,237			395,286,803			
7	1	1	02 .0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret arian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	2 Pak et	2 Pak et	88 inde ks	88 Nilai	4,060,824	4,060,824	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret arian	88 %	4,749,130
7	1	1	02 .0	2	Penyediaan Peralatan	Tingkat kepuasa	Jumlah Paket	Nilai Survey	Kab .	88 %	88 %	2 Pak et	2 Pak et	88 inde ks	88 Nilai	33,740,700	33,696,900	PAD		Tingkat kepuasa	88 %	17,894,631

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			6	dan Perlengkap an Kantor	n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Sid oarj o, Bud ura n,										n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan				
7	1	1	02 .0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	2 Pak et	2 Pak et	88 inde ks	88 Nilai	110,000,000	97,000,000	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	222,048,000
7	1	1	02 .0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	2 Pak et	2 Pak et	88 inde ks	88 Nilai	5,255,200	5,255,200	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	7,369,727
7	1	1	02 .0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	24 Do kume n	12 Do kume n	88 inde ks	88 Nilai	2,400,000	1,560,000	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	3,542,400
7	1	1	02 .0 6	7	Penyediaan Bahan/Materi al	Tingkat kepuasa n aparatur	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang	Nilai Survey Kepuasa n	Kab . Sid oari	88 %	88 %	12 Pa ket	12 Pa ket	88 inde ks	88 Nilai	12,336,000	12,336,000	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur	88 %	3,482,915

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Disediakan	Masyarak at (SKM) Kecamat an	o, Bud ura n,									perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan				
7	1	1	02 .0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	0 Lap oran	0 Lap oran	88 inde ks	88 Nilai	0	0	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	57,000,000
7	1	1	02 .0 6	9	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	4 Lap oran	4 Lap oran	88 inde ks	88 Nilai	200,352,513	185,185,313	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	79,200,000
7	1	1	02 .0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	49,506,000			150,811,320				
7	1	1	02 .0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	3 Unit	3 Unit	88 inde ks	88 inde ks	0	0	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	125,400,000
7	1	1	02 .0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tingkat kepuasa n	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Nilai Survey Kepuasa n	Kab . Sid	88 %	88 %	3 Unit	6 Unit	88 inde ks	88 inde ks	0	49,506,000	PAD		Tingkat kepuasa n	88 %	25,411,320

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Lainnya	aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Lainnya yang Disediakan	n Masyarak at (SKM) Kecamat an	oarj o, Bud ura n,									aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan				
7	1	1	02 .0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,574,927,82 3	1,572,922,82 3				1,373,420,243		
7	1	1	02 .0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	4 Lap oran	4 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	1,430,223	430,22	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	43,482,803
7	1	1	02 .0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	4 Lap oran	4 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	143,500,000	143,500,000	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	302,400,000
7	1	1	02 .0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	88 %	88 %	4 Lap oran	4 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	1,429,997,60 0	1,428,992,60 0	PAD		Tingkat kepuasa n aparatur perangka t daerah terhadap pelayana n kesekret ariatan	88 %	1,027,537,440
7	1	1	02 .0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										105,000,000	95,000,000				96,280,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	an yang dilaksana kan sesuai standar	Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	an	n,									an yang dilaksana kan sesuai standar				
7	1	2	02 .0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									50,000,000	43,250,000					8,018,496		
7	1	2	02 .0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persenta se Pelayana n kewenan gan kecamat an yang dilaksana kan sesuai standar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	85 %	85 %	4 Lap oran	1 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	50,000,000	43,250,000	PAD		Persenta se Pelayana n kewenan gan kecamat an yang dilaksana kan sesuai standar	85 %	8,018,496
7	1	2	02 .0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									8,250,000	63,021,557					1,950,695,937		
7	1	2	02 .0 4	2	Pelaksanaa n Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizina n	Jumlah laporan kegiatan pembina an yang tersusun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	3 lap oran	3 lapo ran	4 Lap oran	4 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	0	0	PAD		Jumlah laporan kegiatan pembina an yang tersusun	3 lap oran	50,400,356
7	1	2	02 .0 4	3	Pelaksanaa n Urusan Pemerintaha n yang Terkait dengan Kewenanga n Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan kegiatan pembina an yang tersusun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	3 lap oran	3 lapo ran		3 Lap oran	88 inde ks	88 inde ks	8,250,000	63,021,557	PAD		Jumlah laporan kegiatan pembina an yang tersusun	3 lap oran	1,900,295,581
							Jumlah Orang yang Mengikuti					150 O rang	0 Ora ng									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										25,930,500	25,930,500				117,185,695		
7	1	4	02 .0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										24,040,500	24,040,500				102,234,303		
7	1	4	02 .0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Persenta se pelangga ran Perda dan Perkada yang ditangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Prosentasi Permasala han trantibum yang difasilitasi	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	70 %	70 %	1 Lap oran	1 Lap oran	70 %	70 %	0	0	PAD	Persenta se pelangga ran Perda dan Perkada yang ditangan	70 %	66,640,876	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Vertikal di Wilayah Kecamatan		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
7	1	4	02 .0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persenta se pelangga ran Perda dan Perkada yang ditangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentasi Permasala han trantibum yang difasilitasi	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	70 %	70 %	4 Lap oran	2 Lap oran	70 %	70 %	24,040,500	24,040,500	PAD		Persenta se pelangga ran Perda dan Perkada yang ditangan	70 %	35,593,428
7	1	4	02 .0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										1,890,000	1,890,000				14,951,392		
7	1	4	02 .0 2	1	Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persenta se pelangga ran perda dan perkada yang ditangani	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentasi Permasala han trantibum yang difasilitasi	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	70 pe rsen	70 per sen	1 Lap oran	1 Lap oran	70 %	70 %	1,890,000	1,890,000	PAD		persenta se pelangga ran perda dan perkada yang ditangani	70 p erse n	14,951,392
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										21,297,540	21,297,540				133,321,950		
7	1	5	02 .0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										21,297,540	21,297,540				133,321,950		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si  Outp ut Ket giatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	5	02 .0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	85 %	85 %	250 O rang	361 O rang	88 inde ks	88 inde ks	17,462,540	17,462,540	PAD		Persenta se penyel en ggaraan urusan pemerint ahan umum yang dilaksana kan dengan baik	85 %	92,454,450
7	1	5	02 .0 1	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Persenta se penyel en ggaraan urusan pemerint ahan umum yang dilaksana kan dengan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	85 %	85 %	4 Lem baga Masya rakat	0 Lem baga Masya rakat	88 inde ks	88 inde ks	0	0	PAD		Persenta se penyel en ggaraan urusan pemerint ahan umum yang dilaksana kan dengan	85 %	37,905,000



Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						garan dan pelapora n sesuai dengan ketentua n dan tepat waktu	Perangkat Desa										garan dan pelapora n sesuai dengan ketentua n dan tepat waktu						
7	1	6	02 .0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaa n Pemilihan Kepala Desa	Prosentase desa yang menyusu n dokumen perencana aan , pengang garan dan pelapora n sesuai dengan ketentua n dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM) Kecamat an	Kab . Sid oarj o, Bud ura n,	100 %	100 %	1 Dok umen	0 Dok umen	88 inde ks	88 inde ks	0	0	PAD		Prosentase desa yang menyusu n dokumen perencana aan , pengang garan dan pelapora n sesuai dengan ketentua n dan tepat waktu	100 %	40,425,000	
TOTAL																5,468,011,127	5,522,782,684				10,124,300,006		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Kecamatan Buduran. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Buduran akan dilaksanakan tahun 2023, Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Perubahan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dengan menyadari bahwa masih adanya beberapa kendala/masalah yang dijumpai dalam pelaksanaannya, agar dapat diupayakan pemecahan dan dijadikan sebagai pemacu pada setiap tingkat tahapan pencapaian keberhasilan tahun anggaran berikutnya.

Demikian gambaran singkat mengenai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buduran Tahun 2023.

Sidoarjo, 31 Juli 2023

**CAMAT BUDURAN**



**Drs. SYAMSURIJAL**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196609121992031013